

Katalog : 7203005.51

***STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-BALI 2011-2015***

**APBD**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**



***STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI BALI 2011-2015***

**APBD**



# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-BALI 2011 – 2015

ISSN : 2477-7773  
No. Publikasi : 51542.1603  
Katalog : 7203005.51  
Ukuran Buku : 21 cm x 14,8 cm  
Jumlah Halaman : x + 50  
Naskah : BPS Provinsi Bali

## Tim Penyusun Naskah

Penanggung Jawab Umum : Adi Nugroho  
Penanggung Jawab Teknis : I Gede Nyoman Subadri

Koordinator : I Gusti Ayu Sri Hardani  
Anggota : I Gede Arya Agus Yogantara

Penyunting : Bidang Statistik Distribusi  
Gambar Sampul : I Gede Arya Agus Yogantara  
Diterbitkan : ©BPS Provinsi Bali

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



## KATA PENGANTAR

Guna memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu menghasilkan pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali untuk ketiga kalinya menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2011 – 2015. Dilengkapi pula dengan ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali sepanjang Tahun 2011 – 2015, publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2016  
Kepala Badan Pusat Statistik,  
Provinsi Bali



**Ir. Adi Nugroho, M.M.**



<http://bali.bps.go.id>





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan .....	3
<b>II. METODOLOGI</b>	
2.1 Ruang Lingkup .....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
2.3 Konsep dan Definisi.....	5
<b>III. ULASAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2011 – 2015</b>	
3.1 Gambaran Umum .....	17
3.2 Pendapatan Daerah.....	21
3.3 Belanja Daerah .....	24
<b>LAMPIRAN TABEL .....</b>	<b>29</b>



<http://bali.bps.go.id>





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.....	17
Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 (triliun rupiah).....	18
Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	19
Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	20
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	21
Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	22
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemeritah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.....	23
Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemeritah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	24
Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	25
Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	26
Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	27
Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen).....	28





<http://bali.bps.go.id>





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	29
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	30
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	31
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	32
Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	33
Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	34
Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	35
Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	36
Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	37
Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	38
Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	39
Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	40
Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	41
Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	42
Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	43
Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) ...	44
Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	45
Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	46



Tabel 19.	Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) ...	47
Tabel 20.	Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2011 – 2015 (000 Rp) .....	48

<http://bali.bps.go.id>





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Salah, disebutkan bahwa satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling mengerti/memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*)



lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat kemana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio – rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio – rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Disajikan pula gambaran yang komprehensif atas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2011 – 2015 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2011 – 2015.



## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2011 – 2015 adalah untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2011 – 2015 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2011 – 2015 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011 – 2015
4. Lampiran Tabel-tabel



<http://bali.bps.go.id>





## II. METODOLOGI

### 2.1. Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2011 – 2015 meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015. Kabupaten/Kota yang dicakup adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Data yang dicakup adalah data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengkompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kantor Bupati/Walikota di seluruh Bali yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah masing-masing melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

### 2.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

#### ❖ Pendapatan Daerah

Didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah





#### ❖ **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### ❖ **Pajak Daerah**

Didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

#### ❖ **Retribusi Daerah**

Didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### ❖ **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

#### ❖ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**



Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain.

❖ **Dana Perimbangan**

Didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

❖ **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

➤ **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

➤ **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

❖ **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk



menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

❖ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

❖ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

❖ **Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.



#### ❖ **Belanja Tak Langsung**

Didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

#### ❖ **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**

Didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

#### ❖ **Belanja Bunga**

Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### ❖ **Belanja Subsidi**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.



#### ❖ **Belanja Hibah**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

#### ❖ **Belanja Bantuan Sosial**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### ❖ **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### ❖ **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

#### ❖ **Belanja Tidak Terduga**

Didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



#### ❖ **Belanja Langsung**

Didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

#### ❖ **Belanja Pegawai (Langsung)**

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### ❖ **Belanja Modal**

Didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

#### ❖ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

#### ❖ **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana



perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

❖ **Pencairan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

❖ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

❖ **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

❖ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

❖ **Penerimaan Piutang Daerah**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

❖ **Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi danayang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.



#### ❖ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

#### ❖ **Pembentukan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

#### ❖ **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

#### ❖ **Pembayaran Pokok Utang**

Didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### ❖ **Pemberian Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

#### ❖ **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.





Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa rasio yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan pemerintah daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi rasio-rasio yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

#### ❖ **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

#### ❖ **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)

#### ❖ **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir(2004:48). Rasio efektivitas PAD



dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

❖ **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

❖ **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh,dkk: 2011).



<http://bali.bps.go.id>

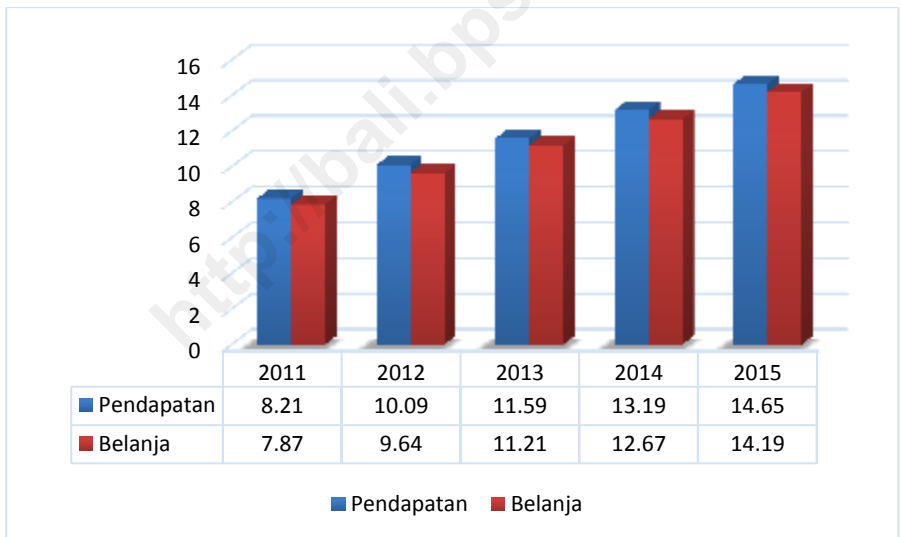




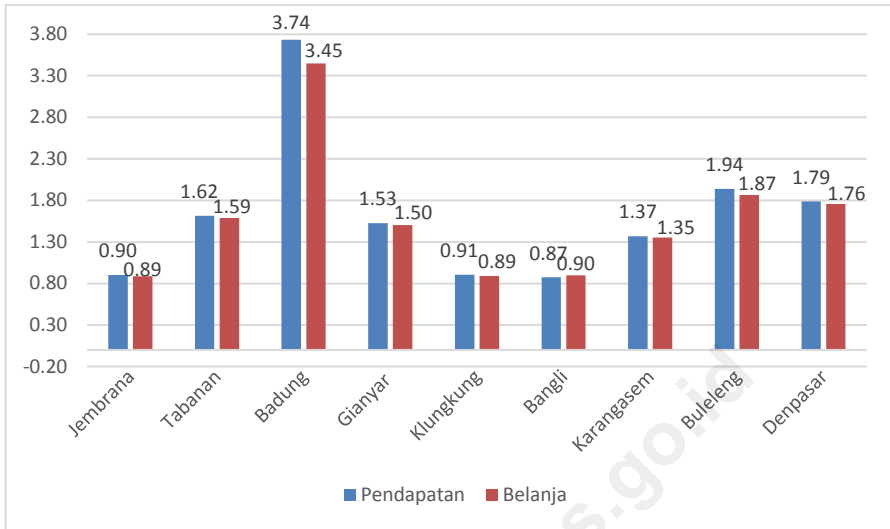
### III. Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011 – 2015

#### 3.1 Gambaran Umum

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2011 – 2015 dari kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat adanya trend kenaikan baik itu dari sisi total pendapatan maupun belanja (gambar 1). Total pendapatan daerah 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 8,21 triliun rupiah di tahun 2011 kemudian menjadi 14,65 triliun rupiah pada tahun 2015, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 78,44 persen atau tumbuh rata – rata 19,61 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan. Dalam rentang waktu 2011 – 2015, belanja daerah tumbuh 80,31 persen atau naik rata - rata 20,08 persen per tahun.

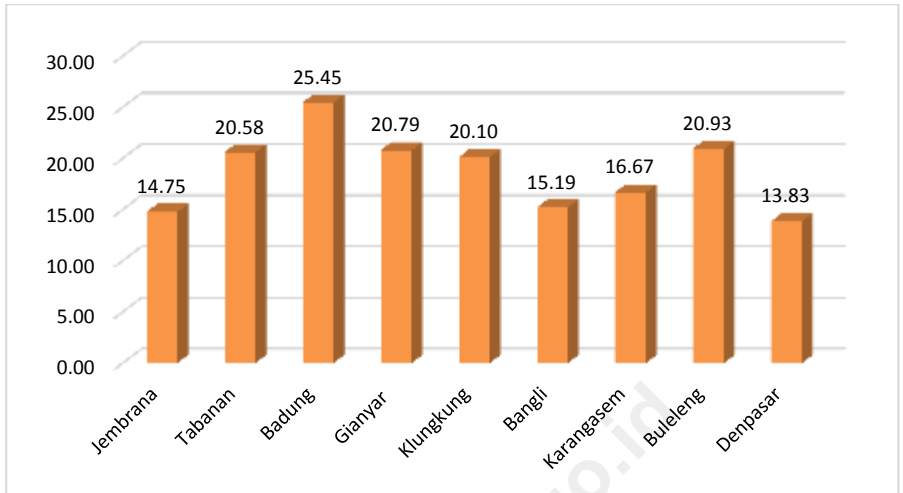


Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011 – 2015 (Triliun Rupiah)



Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 (triliun rupiah)

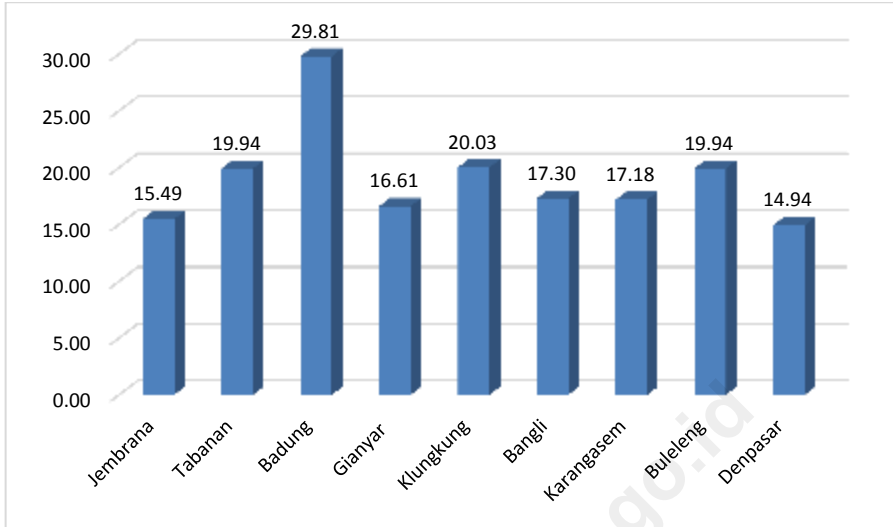
Berdasarkan realisasi pendapatan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015 (gambar 2), menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mempunyai pendapatan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan penerimaan APBD pada tahun 2015 mencapai 3,74 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 3,45 triliun rupiah. Sedangkan Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar mencapai penerimaan APBD masing-masing sebesar 1,94 triliun rupiah dan 1,79 triliun rupiah serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 1,87 triliun rupiah dan 1,76 triliun rupiah. Di sisi lain, kabupaten yang tercatat memiliki capaian realisasi APBD tahun 2015 paling rendah tercatat di Kabupaten Bangli dengan nilai penerimaan sebesar 0,87 triliun rupiah dan belanja daerah 0,90 triliun rupiah, disusul oleh Kabupaten Klungkung dan Jembrana dengan capaian realisasi penerimaan APBD tahun 2015 masing-masing sebesar 0,91 triliun rupiah dan 0,90 triliun rupiah serta nilai belanja daerah masing-masing sebesar 0,89 triliun rupiah.



Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)

Rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten/kota se- Provinsi Bali pada periode 2011 – 2015, tercatat berada di atas 10 persen per tahunnya untuk seluruh kabupaten/kota (Gambar 3). Pendapatan daerah Kabupaten Badung tercatat mencapai rata – rata tertinggi di Provinsi Bali, yaitu 25,45 persen per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Badung ini, kiranya tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata khususnya di wilayah Badung Selatan. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah terendah dalam lima tahun terakhir terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 13,38 persen per tahun.

Kabupaten Badung merupakan daerah dengan APBD terbesar pada kenyataannya juga memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi. Sebaliknya Kabupaten Bangli dan Jembrana yang tercatat sebagai daerah dengan APBD yang rendah juga memiliki pertumbuhan yang rendah, dengan kisaran pertumbuhan dibawah 20 persen per tahun.



Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)

Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4, terlihat bahwa beberapa wilayah memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi belanja dalam kurun waktu 2011-2015 per tahunnya berada dibawah tingkat pertumbuhan pendapatannya, yaitu Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. Sebagian lainnya, rata-rata tingkat pertumbuhan belanja daerahnya lebih tinggi dari pada pertumbuhan penerimaannya, yaitu Jembrana, Badung, Bangli, Karangasem dan Denpasar.

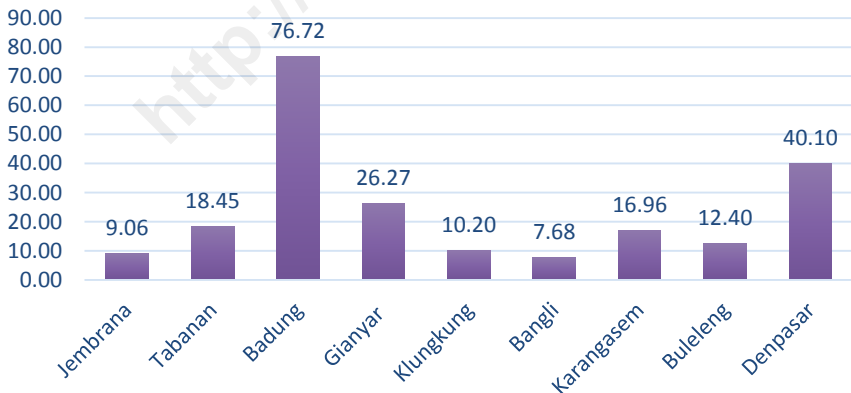
Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Badung merupakan yang tertinggi di Provinsi Bali dalam periode 2011-2015 yaitu mencapai 29,81 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Badung ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerahnya yang hanya sebesar 25,45 persen per tahunnya. Sementara itu, Kota Denpasar memiliki rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang terendah dalam periode 2011-2015 yaitu sebesar 14,94 persen per tahunnya.



### 3.2 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam pengukuran desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.



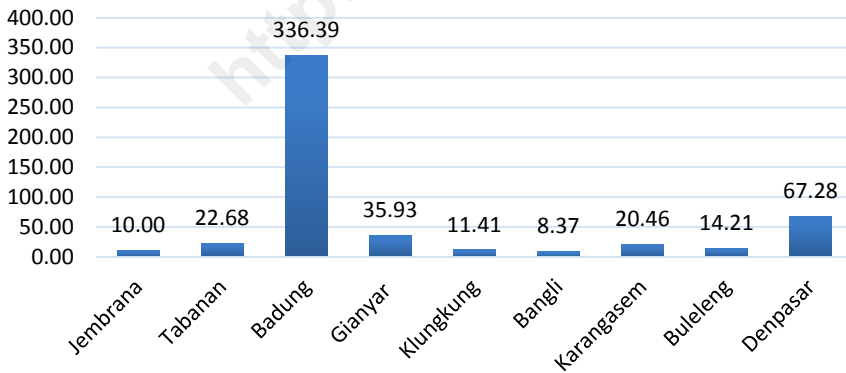
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)





Bila dilihat rata-rata derajat desentralisasi fiskal dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tercatat Kabupaten Badung memiliki nilai tertinggi, mencapai 76,72 persen. Sesuai hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi, terlihat bahwa Kabupaten Jembrana dan Bangli tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat kurang. Selanjutnya Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem dan Buleleng tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang masih kurang. Sementara itu Kabupaten Gianyar tergolong memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sedang sedangkan Kota Denpasar termasuk dalam kelompok dengan derajat desentralisasi fiskal yang baik. Derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik hanya mampu dicapai oleh Kabupaten Badung dengan capaian di atas 50 persen.

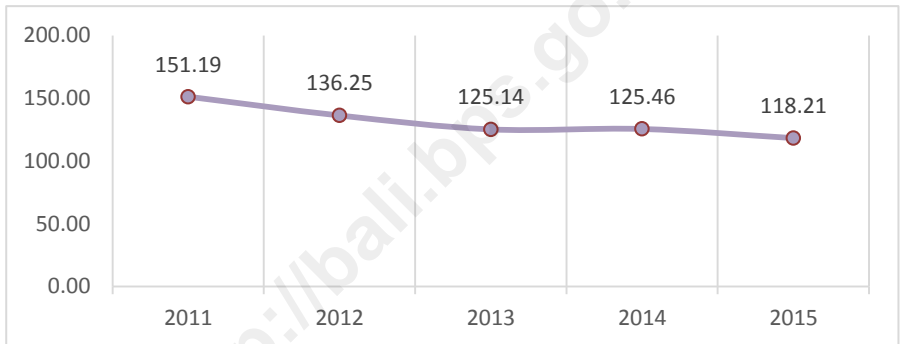
Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010:77). Dalam kurun waktu 2011-2015, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)



Seperti yang disajikan pada Gambar 6, Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi, yaitu sebesar 336,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung telah memiliki kemandirian fiskal yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan tiga kali lipat pendapatan diluar PAD. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Bangli tercatat memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang paling rendah, yaitu 8,37 persen. Hal ini kiranya menunjukkan Pemerintah Daerah Bangli masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya



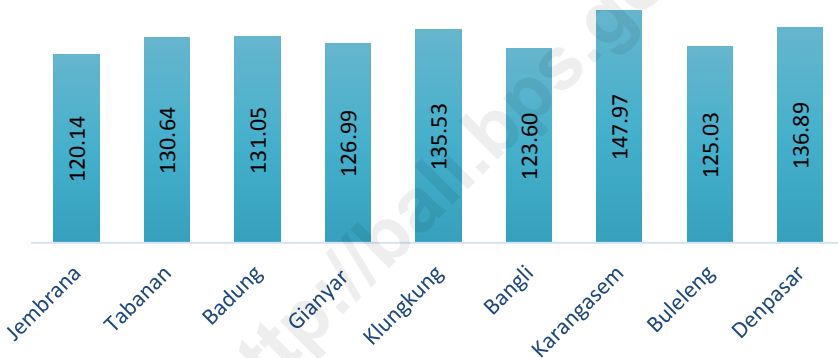
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)

Mengingat peran PAD yang merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah sedapat mungkin secara efektif mengelola PAD tersebut. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah. Secara umum, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan nilai diatas 100 yang berarti bahwa realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD.



Perkembangan rasio ini selama periode 2011 – 2015, menunjukkan tren penurunan, seperti terlihat pada Gambar 7, dengan rasio tertinggi tercatat pada tahun 2011 sebesar 151,19 persen dan terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 118,21 persen.

Bila dilihat rata – rata rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2011 – 2015, terlihat bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali memiliki nilai rasio diatas 100 (Gambar 8). Kabupaten Karangasem memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar 147,97 persen. Sementara itu, rasio terendah tercatat untuk Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 120,14 persen. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lagi potensi riil daerahnya yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai PAD sehingga nantinya dapat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.



Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)

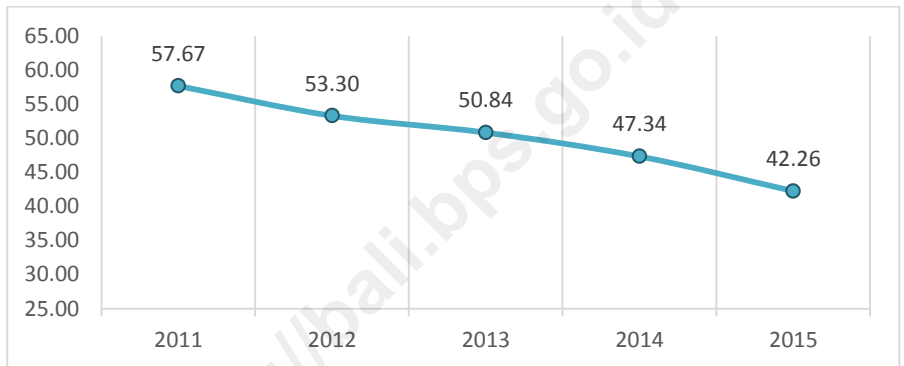
### 3.3 Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah kiranya memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga sekaligus merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja daerah memperlihatkan



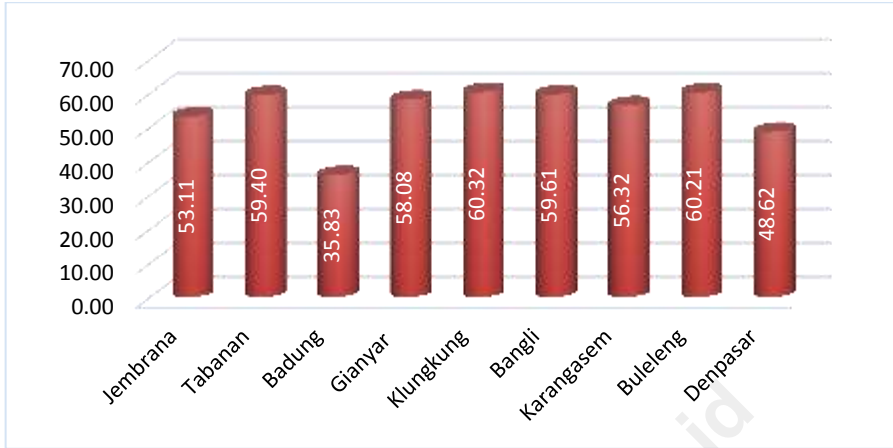
program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2011 – 2015 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja pegawai. Pada rentang waktu 2011-2013, presentase belanja pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali berada diatas 50 persen. Namun mulai tahun 2014, rasio belanja pegawai sudah tercatat menurun bahkan berada di bawah 50 persen (Gambar 9). Tingginya rasio belanja pegawai pada pemerintah daerah kabupaten/kota ini mungkin terkait dengan tingginya jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah.



Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)

Selama periode 2011-2015, hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dengan rata – rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja dibawah 50 persen yaitu masing-masing sebesar 35,83 persen dan 48,62 persen (Gambar 10). Sementara itu, kabupaten lainnya masih memiliki rasio belanja pegawai terhadap total belanja diatas 50 persen. Secara rata – rata, rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi dalam periode 2011 – 2015 tercatat di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 60,32 persen, disusul oleh Kabupaten Buleleng sebesar 60,21 persen.



Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)

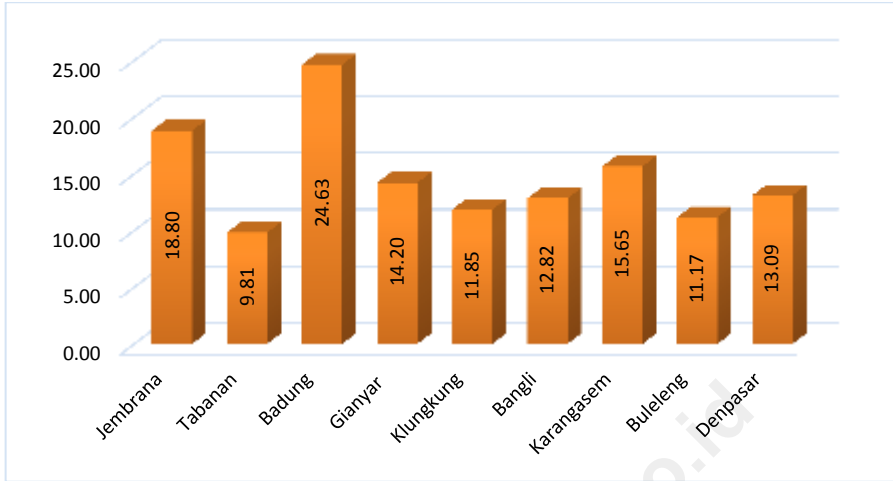
Belanja Modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong investasi di daerah bersangkutan, sehingga ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ratio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2011 – 2015 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan trend kenaikan terutama pada tahun 2011 ke 2012 (Gambar 11). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja selama 2011-2015 tercatat berada dibawah 20 persen.



*Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)*

Rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 12. Kabupaten Badung memiliki rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi yaitu 24,63 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung memungkinkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu 2011-2015. Sementara itu, rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja terendah tercatat di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 9,81 persen.



Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)



## LAMPIRAN TABEL

<http://balliops.go.id>







<http://bali.bps.go.id>





Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>559.656.551</b>	<b>608.724.425</b>	<b>693.772.159</b>	<b>766.305.431</b>	<b>836.696.489</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.247.620	51.066.992	54.775.109	65.680.235	72.832.071
1.1 Hasil Pajak Daerah	9.047.420	9.802.025	18.512.225	20.406.000	24.286.000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	5.204.861	7.409.973	8.306.800	9.324.885	9.575.682
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.602.469	2.602.469	2.850.000	3.986.800	5.937.000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.392.870	31.252.525	25.106.084	31.962.550	33.033.389
2 DANA PERIMBANGAN	395.555.988	457.498.291	511.597.003	550.401.204	29.732.457
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.565.602	20.565.602	15.274.007	22.029.070	20.442.465
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	339.501.986	396.762.339	450.919.726	484.825.804	486.895.030
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	35.488.400	40.170.350	45.403.270	43.546.330	63.039.590
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	127.852.943	100.159.142	127.400.047	150.223.992	193.487.333
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.799.208	63.982.477	72.868.021	77.364.265	105.791.275
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.266.895	33.178.975	51.680.144	70.517.727	81.759.988
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.786.840	2.997.690	2.851.882	2.342.000	825.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	5.111.070
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>615.427.631</b>	<b>640.724.425</b>	<b>720.054.951</b>	<b>798.331.840</b>	<b>875.100.013</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	383.875.593	395.301.047	439.268.856	468.885.497	535.450.413
1.1 Belanja Pegawai	328.619.695	337.794.009	377.721.422	399.928.196	433.300.140
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	14.248.996	19.696.500	12.410.654	16.483.654	40.468.654
1.5 Belanja Bantuan Sosial	17.484.405	60.000	3.410.000	3.450.000	700.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.039.984	6.602.485	7.843.127	8.476.313	10.826.414
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.982.513	30.648.053	37.383.653	40.147.334	49.755.205
1.8 Belanja Tidak Terduga	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000
2 BELANJA LANGSUNG	231.552.038	245.423.378	280.786.095	329.446.343	339.649.600
2.1 Belanja Pegawai	8.606.141	29.465.624	35.019.951	28.276.605	33.332.647
2.2 Belanja Barang dan Jasa	126.590.883	109.892.570	119.885.953	154.026.486	156.078.816
2.3 Belanja Modal	96.355.014	106.065.184	125.880.190	147.143.252	150.238.137
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>55.771.080</b>	<b>32.000.000</b>	<b>26.282.791</b>	<b>32.026.409</b>	<b>4.568.122</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62.099.080	38.097.000	35.679.791	41.494.848	48.362.528
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.871.080	32.100.000	29.482.791	36.231.954	43.099.634
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	62.894	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	62.894
1.8 Lainnya	6.228.000	5.997.000	6.197.000	5.200.000	5.200.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.328.000	6.097.000	9.397.000	9.468.439	9.959.004
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000	0	3.200.000	4.268.439	4.759.004
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	997.000	0	0
2.5 Lainnya	6.228.000	6.097.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)**

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>760.393.395</b>	<b>956.531.601</b>	<b>1.110.810.797</b>	<b>1.260.942.535</b>	<b>1.405.197.386</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.177.833	137.107.830	182.799.113	212.931.601	243.793.958
1.1 Hasil Pajak Daerah	21.912.170	28.724.089	57.208.398	63.408.398	84.249.480
1.2 Hasil Retribusi Daerah	18.626.998	21.977.882	28.714.329	37.841.187	41.458.781
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.788.026	5.404.980	5.925.321	8.046.089	8.046.089
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.850.639	81.000.879	90.951.065	103.635.927	110.039.608
2 DANA PERIMBANGAN	532.991.485	652.220.986	730.087.497	798.650.500	107.177.945
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.172.842	30.508.202	18.009.432	20.514.480	23.038.891
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	463.294.443	574.346.244	663.156.595	719.621.530	722.004.642
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	41.524.200	47.366.540	48.921.470	58.514.490	59.386.100
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.224.077	167.202.785	197.924.187	249.360.434	356.973.795
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.263.120	79.592.933	90.789.282	96.342.065	132.459.065
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.765.899	81.732.532	98.586.909	146.900.369	224.111.730
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.195.058	5.877.320	8.547.996	6.118.000	403.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>817.012.819</b>	<b>996.251.601</b>	<b>1.142.530.797</b>	<b>1.287.757.355</b>	<b>1.429.917.386</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	620.322.248	696.077.112	780.426.324	888.661.528	1.045.313.438
1.1 Belanja Pegawai	533.802.709	612.796.418	681.735.119	769.764.376	878.463.853
1.2 Belanja Bunga	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	22.920.050	21.250.300	24.453.000	32.355.000	41.001.813
1.5 Belanja Bantuan Sosial	7.522.500	0	6.000.000	6.000.000	9.000.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.350.641	3.327.289	6.099.798	6.689.000	8.668.700
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	52.621.303	56.880.349	59.637.765	71.117.960	107.077.858
1.8 Belanja Tidak Terduga	905.045	1.722.756	2.400.643	2.635.192	1.001.214
2 BELANJA LANGSUNG	196.690.571	300.174.489	362.104.473	399.095.827	384.603.948
2.1 Belanja Pegawai	7.458.074	13.018.909	14.428.268	14.970.987	22.661.449
2.2 Belanja Barang dan Jasa	113.671.707	152.055.072	223.003.943	260.978.974	282.243.569
2.3 Belanja Modal	75.560.790	135.100.508	124.672.262	123.145.866	79.698.930
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>56.619.424</b>	<b>39.720.000</b>	<b>31.720.000</b>	<b>26.814.820</b>	<b>65.235.151</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	57.099.424	42.000.000	37.000.000	32.094.820	40.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.099.424	42.000.000	37.000.000	32.094.820	40.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Prutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	480.000	2.280.000	5.280.000	5.280.000	15.280.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	400.000	2.200.000	5.200.000	5.200.000	14.400.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	80.000	80.000	80.000	80.000	880.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)**

	Rincian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.295.730.903</b>	<b>1.935.433.575</b>	<b>2.494.697.356</b>	<b>2.804.744.832</b>	<b>3.251.270.645</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	925.476.021	1.320.910.478	1.874.766.393	2.197.959.213	2.581.898.769
1.1	Hasil Pajak Daerah	862.669.037	1.207.320.000	1.726.810.360	1.986.068.719	2.302.810.000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.480.824	37.842.067	64.555.270	75.687.001	75.244.749
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.945.535	34.623.740	43.590.838	77.554.931	111.812.395
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.380.625	41.124.671	39.809.925	58.648.562	92.031.625
2	DANA PERIMBANGAN	326.586.548	442.315.671	404.924.830	356.523.053	55.276.625
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.369.401	87.409.445	31.738.647	31.156.198	62.789.526
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	156.926.247	353.067.906	372.625.383	324.815.695	286.763.106
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	290.900	1.838.320	560.800	551.160	0
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.668.334	172.207.426	215.006.133	250.262.566	319.819.244
3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.653.294	98.259.035	106.705.857	112.889.003	164.056.474
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	46.475.298	76.432.769	113.491.184	155.557.770
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.015.040	4.188.540	2.909.325	571.000	205.000
3.6	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	23.284.553	28.958.182	23.311.379	0
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.502.159.418</b>	<b>2.051.315.790</b>	<b>2.859.793.967</b>	<b>3.269.667.130</b>	<b>3.527.203.220</b>
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.079.650.066	1.230.344.838	1.464.760.252	1.632.668.191	1.901.565.200
1.1	Belanja Pegawai	737.469.831	821.435.762	928.622.880	1.048.987.236	1.117.317.956
1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3	Belanja Subsidi	840.000	660.000	2.090.000	3.870.000	5.420.000
1.4	Belanja Hibah	51.021.580	42.922.220	63.545.583	76.624.649	183.489.696
1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.933.040	39.863.343	55.001.742	34.150.000	34.150.000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	104.551.926	133.257.151	195.922.510	241.519.389	286.013.710
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	161.833.689	189.206.362	216.577.537	224.516.917	272.173.838
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	BELANJA LANGSUNG	422.509.352	820.970.952	1.395.033.715	1.636.998.939	1.625.638.020
2.1	Belanja Pegawai	32.899.530	55.540.066	74.320.572	67.333.155	66.383.972
2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.817.227	325.505.307	428.038.244	571.809.035	569.848.140
2.3	Belanja Modal	173.792.595	439.925.579	892.674.899	997.856.749	989.405.908
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>207.161.174</b>	<b>115.882.215</b>	<b>365.096.611</b>	<b>464.922.298</b>	<b>411.341</b>
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	215.608.574	261.082.215	479.096.611	464.922.298	275.932.575
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	215.608.574	261.082.215	479.096.611	464.922.298	275.932.575
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8	Lainnya	0	0	0	0	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.447.400	145.200.000	114.000.000	0	0
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000	145.200.000	114.000.000	0	0
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5	Lainnya	1.947.400	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>732.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>807.983.991</b>	<b>974.869.151</b>	<b>1.112.299.413</b>	<b>1.187.870.082</b>	<b>1.339.991.864</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.348.894	210.192.685	238.558.925	312.160.449	370.679.368
1.1 Hasil Pajak Daerah	86.272.299	143.247.723	156.458.723	211.596.789	248.254.234
1.2 Hasil Retribusi Daerah	28.818.182	27.727.106	27.546.296	30.560.391	31.668.994
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.339.119	5.339.119	5.339.119	6.616.161	9.902.111
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.919.294	33.878.737	49.214.788	63.387.108	80.854.029
2 DANA PERIMBANGAN	509.368.719	592.077.460	683.872.430	684.180.739	73.111.095
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.188.501	23.264.259	29.420.424	12.623.291	24.729.422
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	435.103.918	532.883.001	609.293.266	626.674.608	641.915.439
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	41.076.300	35.930.200	45.158.740	44.882.840	0
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.266.378	172.599.006	189.868.058	191.528.894	302.667.635
3.1 Pendapatan Hibah	1.726.420	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.588.482	64.142.479	69.626.817	73.596.586	107.660.232
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103.361.536	105.233.087	116.634.566	110.908.308	188.602.403
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.589.940	3.223.440	3.606.676	7.024.000	6.405.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>862.983.527</b>	<b>1.006.519.359</b>	<b>1.156.799.413</b>	<b>1.285.370.082</b>	<b>1.445.120.459</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	600.111.627	698.038.290	765.204.605	816.325.763	993.556.610
1.1 Belanja Pegawai	518.430.578	608.763.139	670.620.250	699.814.264	838.350.786
1.2 Belanja Bunga	1.074.200	75.050	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	2.818.320	2.818.320	2.872.920	0	0
1.4 Belanja Hibah	17.580.987	29.363.582	25.053.300	23.881.650	22.514.710
1.5 Belanja Bantuan Sosial	14.513.900	0	8.475.000	9.989.130	5.173.630
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21.587.446	25.332.668	25.612.785	31.492.420	32.725.924
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	23.806.196	31.385.531	34.270.350	50.648.299	94.291.560
1.8 Belanja Tidak Terduga	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000
2 BELANJA LANGSUNG	262.871.900	308.481.069	391.594.808	469.044.319	451.563.849
2.1 Belanja Pegawai	30.767.753	34.160.350	32.164.235	36.415.667	44.133.377
2.2 Belanja Barang dan Jasa	118.185.757	140.376.213	176.459.357	231.697.502	216.148.494
2.3 Belanja Modal	113.918.390	133.944.506	182.971.217	200.931.150	191.281.978
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>54.999.536</b>	<b>32.349.792</b>	<b>44.500.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>83.915.981</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	64.836.178	35.349.792	50.000.000	105.000.000	112.628.595
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64.836.178	35.000.000	50.000.000	105.000.000	112.628.595
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	349.792	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.836.642	3.000.000	5.500.000	7.500.000	7.500.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	9.836.642	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	3.000.000	5.500.000	7.500.000	7.500.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>699.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>454.717.384</b>	<b>554.900.431</b>	<b>613.644.989</b>	<b>667.389.254</b>	<b>838.871.569</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.159.730	35.603.693	48.541.694	69.749.456	89.563.450
1.1 Hasil Pajak Daerah	4.111.496	871.733	7.020.496	12.946.461	17.038.900
1.2 Hasil Retribusi Daerah	20.094.126	0	12.575.127	19.876.663	19.609.138
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.230.395	5.228.434	5.963.550	8.619.793	8.101.503
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.723.713	29.503.526	22.982.522	28.306.539	44.813.909
2 DANA PERIMBANGAN	366.637.386	440.155.874	507.661.415	531.480.691	39.436.391
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.937.130	19.720.621	19.775.716	14.785.505	18.650.569
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	319.814.056	387.340.103	444.174.019	474.427.796	484.541.151
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	29.886.200	33.095.150	43.711.680	42.267.390	54.045.790
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.920.268	79.140.864	57.411.879	66.159.107	192.070.609
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.959.100	47.949.281	55.231.304	58.483.707	78.500.342
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12.273.908	29.288.473	0	0	98.167.267
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.687.260	1.903.110	2.210.575	7.675.400	15.403.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>511.670.994</b>	<b>590.253.930</b>	<b>647.135.362</b>	<b>709.378.305</b>	<b>912.707.523</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	340.574.693	398.949.275	433.248.609	455.215.480	597.789.006
1.1 Belanja Pegawai	305.335.823	368.382.599	357.658.272	381.191.187	490.736.393
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	8.151.735	4.703.735	46.543.176	41.666.374	37.993.734
1.5 Belanja Bantuan Sosial	9.330.882	7.569.840	551.000	2.081.977	1.662.500
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	824.131	844.481	2.519.352	2.519.352	7.447.241
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16.178.622	16.448.620	24.976.809	27.456.590	59.649.138
1.8 Belanja Tidak Terduga	753.500	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000
2 BELANJA LANGSUNG	171.096.301	191.304.655	213.886.753	254.162.825	314.918.517
2.1 Belanja Pegawai	10.896.511	9.779.060	17.420.901	11.455.689	14.046.907
2.2 Belanja Barang dan Jasa	77.395.727	87.121.555	113.569.926	154.470.454	175.184.539
2.3 Belanja Modal	82.804.063	94.404.040	82.895.927	88.236.682	125.687.071
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>56.953.610</b>	<b>35.353.499</b>	<b>33.490.374</b>	<b>42.682.754</b>	<b>13.008.529</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	57.303.610	37.703.499	38.740.374	45.432.754	76.210.954
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.078.610	37.535.374	37.535.374	44.682.754	75.835.954
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	168.125	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	225.000	0	1.205.000	750.000	375.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	350.000	2.350.000	5.250.000	2.750.000	2.375.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	350.000	2.350.000	5.250.000	2.750.000	2.375.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.703</b>	<b>0</b>



**Table 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)**

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>519.595.092</b>	<b>567.249.437</b>	<b>653.197.481</b>	<b>721.635.214</b>	<b>826.028.973</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.200.000	31.000.000	42.000.000	55.200.000	82.000.000
1.1 Hasil Pajak Daerah	3.473.352	5.793.609	7.101.021	10.161.312	10.241.554
1.2 Hasil Retribusi Daerah	11.495.766	12.486.918	12.623.598	14.045.488	22.252.888
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.419.629	2.500.000	2.500.000	4.400.200	3.318.478
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.811.253	10.219.473	19.775.381	26.593.000	46.187.080
2 DANA PERIMBANGAN	370.023.272	453.987.421	511.399.438	548.602.929	44.715.580
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.092.681	18.785.258	18.883.194	19.026.004	19.079.052
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	321.578.191	396.942.913	450.812.694	486.381.005	499.734.801
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	29.352.400	38.259.250	41.703.550	43.195.920	55.096.890
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.371.820	82.262.016	99.798.044	117.832.285	170.118.230
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.376.480	49.137.935	56.790.913	60.133.119	80.308.152
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74.717.200	27.452.881	39.289.956	55.975.166	86.367.248
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.278.140	5.671.200	3.717.175	1.724.000	3.442.830
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>567.441.778</b>	<b>596.749.437</b>	<b>688.479.409</b>	<b>784.773.769</b>	<b>930.895.765</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	365.507.113	404.853.803	509.620.090	560.902.120	662.045.111
1.1 Belanja Pegawai	315.438.008	354.484.440	411.795.654	445.509.408	531.937.565
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	165.000	165.000	1.165.000	0	0
1.4 Belanja Hibah	6.349.445	8.014.350	20.350.419	35.076.399	41.927.000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	6.310.500	767.900	5.036.450	4.473.000	1.300.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.576.912	1.828.053	1.972.462	2.420.830	3.300.444
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	34.533.856	38.340.310	68.300.105	71.922.483	82.680.102
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.133.392	1.253.750	1.000.000	1.500.000	900.000
2 BELANJA LANGSUNG	201.934.665	191.895.634	178.859.319	223.871.649	268.850.654
2.1 Belanja Pegawai	18.486.355	18.608.572	21.339.245	21.072.750	48.455.058
2.2 Belanja Barang dan Jasa	73.279.156	89.481.279	102.237.917	133.919.731	124.704.281
2.3 Belanja Modal	110.169.154	83.805.783	55.282.157	68.879.168	95.691.315
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>47.846.686</b>	<b>29.500.000</b>	<b>35.281.928</b>	<b>63.138.555</b>	<b>2.741.893</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49.846.686	30.000.000	35.281.928	63.638.555	104.866.792
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.362.426	30.000.000	35.281.928	63.638.555	104.866.792
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	484.260	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000	500.000	0	500.000	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000	500.000	0	500.000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>667.049.700</b>	<b>837.759.326</b>	<b>957.295.413</b>	<b>1.116.371.215</b>	<b>1.226.081.077</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.830.543	124.305.930	140.991.228	160.008.363	205.273.392
1.1 Hasil Pajak Daerah	28.692.000	77.627.801	86.292.000	99.758.423	125.839.116
1.2 Hasil Retribusi Daerah	5.657.000	7.247.980	9.050.205	10.191.800	10.236.014
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000	11.097.108	12.250.300	15.418.140	14.633.230
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.481.543	28.333.041	33.398.723	34.640.000	54.565.032
2 DANA PERIMBANGAN	473.984.295	576.383.961	642.839.138	701.929.283	50.855.032
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.211.856	26.590.371	26.647.713	26.661.842	23.024.006
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	410.037.739	503.028.930	563.981.785	614.793.461	633.241.287
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	41.734.700	46.764.660	51.209.640	60.473.980	69.845.030
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138.234.862	137.069.435	174.465.047	254.433.569	294.697.362
3.1 Pendapatan Hibah	180.000	420.000	420.000	420.000	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.562.942	55.313.093	60.209.968	63.995.987	91.401.629
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.961.948	54.485.573	79.110.834	116.152.134	166.686.741
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.529.972	26.840.769	34.724.245	73.865.448	36.608.992
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	10.000	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>722.528.555</b>	<b>984.323.383</b>	<b>1.049.658.680</b>	<b>1.155.747.491</b>	<b>1.269.495.869</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	515.968.190	603.562.760	681.484.820	765.199.902	895.592.830
1.1 Belanja Pegawai	449.082.131	522.732.626	581.596.339	658.216.931	721.799.958
1.2 Belanja Bunga	165.000	1.165.000	8.165.000	8.165.000	8.165.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	10.854.544	29.627.784	27.187.500	30.436.007	42.556.326
1.5 Belanja Bantuan Sosial	17.997.000	195.000	2.955.000	3.000.000	3.242.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.736.450	11.386.770	13.154.302	15.071.742	13.607.513
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.633.065	35.755.580	45.226.679	47.310.222	103.222.033
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.500.000	2.700.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	206.560.365	380.760.623	368.173.860	390.547.589	373.903.039
2.1 Belanja Pegawai	13.283.238	14.377.493	19.921.866	19.576.789	20.644.145
2.2 Belanja Barang dan Jasa	99.709.269	138.501.985	173.168.855	211.036.689	236.147.176
2.3 Belanja Modal	93.567.858	227.881.145	175.083.019	159.934.111	117.111.718
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>55.478.855</b>	<b>146.564.057</b>	<b>92.363.267</b>	<b>39.376.276</b>	<b>16.680.763</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.672.042	151.525.018	111.863.267	66.389.276	72.795.932
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.134.838	48.167.685	46.045.844	66.389.276	72.795.932
1.2 Pencairan Dana Cadangan	5.537.204	5.357.333	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	98.000.000	65.817.423	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.193.187	4.960.961	19.500.000	27.013.000	29.381.140
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	4.255.733	312.979	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000	3.847.108	5.000.000	2.000.000	4.368.140
2.3 Pembayaran Pokok Utang	937.454	800.874	14.500.000	25.013.000	25.013.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>948.490.948</b>	<b>1.118.371.415</b>	<b>1.286.766.285</b>	<b>1.468.256.803</b>	<b>1.668.718.324</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.600.000	111.569.018	128.000.000	176.133.800	221.903.000
1.1 Hasil Pajak Daerah	20.560.000	36.127.887	40.958.425	68.972.337	85.782.281
1.2 Hasil Retribusi Daerah	8.804.246	8.218.192	12.131.756	13.106.070	13.018.096
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.912.260	9.156.368	9.734.199	12.730.798	11.961.901
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.323.494	58.066.571	65.175.620	81.324.595	111.140.722
2 DANA PERIMBANGAN	664.288.485	794.743.794	906.226.901	957.813.099	99.931.800
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.153.478	44.456.898	42.495.661	38.382.641	33.629.377
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	568.406.307	687.697.696	796.419.220	854.532.248	868.511.959
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	54.728.700	62.589.200	67.312.020	64.898.210	74.876.950
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.602.463	212.058.603	252.539.384	334.309.904	469.797.038
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.522.577	105.691.634	120.747.557	127.877.285	172.687.624
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.919.536	87.624.978	126.009.808	186.575.619	281.331.752
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.392.180	17.989.992	5.782.018	19.857.000	15.777.662
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	768.170	751.999	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.035.921.929</b>	<b>1.170.579.218</b>	<b>1.401.593.792</b>	<b>1.605.091.803</b>	<b>1.785.202.066</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	711.669.460	836.491.898	917.199.812	986.233.738	1.176.323.664
1.1 Belanja Pegawai	630.866.703	715.422.526	806.791.653	867.579.713	982.146.961
1.2 Belanja Bunga	20.000	200.000	60.000	60.000	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	17.635.361	58.779.700	28.710.000	28.000.000	35.329.407
1.5 Belanja Bantuan Sosial	5.008.000	2.169.822	4.915.000	4.515.000	4.765.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.000.000	4.000.000	3.930.093	8.207.841	9.880.038
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	50.695.497	54.235.500	71.378.445	71.844.402	138.942.445
1.8 Belanja Tidak Terduga	4.443.899	1.684.350	1.414.711	6.026.782	5.259.813
2 BELANJA LANGSUNG	324.252.469	334.087.320	484.393.980	618.858.065	608.878.402
2.1 Belanja Pegawai	23.969.852	18.572.949	28.913.324	30.395.700	31.674.659
2.2 Belanja Barang dan Jasa	168.547.688	186.983.825	254.209.425	327.145.718	343.487.160
2.3 Belanja Modal	131.734.929	128.530.546	201.271.232	261.316.647	233.716.583
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>87.430.981</b>	<b>52.207.803</b>	<b>114.827.507</b>	<b>136.835.000</b>	<b>17.209.024</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	90.380.981	55.157.803	120.377.507	145.000.000	127.133.742
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90.380.981	55.157.803	120.377.507	145.000.000	127.133.742
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.950.000	2.950.000	5.550.000	8.165.000	10.650.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.600.000	2.600.000	5.250.000	7.865.000	10.650.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	350.000	350.000	300.000	300.000	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>937.935.244</b>	<b>1.149.331.960</b>	<b>1.278.760.313</b>	<b>1.467.521.163</b>	<b>1.725.426.452</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.807.632	352.511.291	513.061.591	610.266.592	681.259.855
1.1 Hasil Pajak Daerah	161.500.000	267.800.000	403.000.000	468.840.592	523.978.712
1.2 Hasil Retribusi Daerah	21.164.750	23.533.750	38.079.489	44.804.344	44.029.560
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.177.592	13.455.541	15.325.102	24.815.606	24.531.583
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.965.290	47.722.000	56.657.000	71.806.050	88.720.000
2 DANA PERIMBANGAN	530.920.924	614.150.405	656.582.041	715.256.133	76.600.000
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	145.825.986	92.994.609	64.982.449	74.651.447	71.101.582
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	381.538.038	512.666.446	580.807.702	615.961.906	625.978.507
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.556.900	8.489.350	10.791.890	24.642.780	5.226.190
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	174.206.688	182.670.264	109.116.680	141.998.438	341.860.318
3.1 Pendapatan Hibah	111.159.367	4.688.512	1.688.512	1.636.248	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.782.621	92.575.449	100.529.183	106.343.905	158.753.502
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	83.956.353	0	22.763.285	182.856.816
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.264.700	1.449.950	6.898.985	11.255.000	250.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.027.835.244</b>	<b>1.218.291.878</b>	<b>1.353.987.823</b>	<b>1.552.521.163</b>	<b>1.760.606.869</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	714.333.258	672.616.325	661.132.515	750.941.457	1.016.504.141
1.1 Belanja Pegawai	578.415.527	589.379.525	579.045.203	626.718.909	830.056.405
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	61.520.675	16.961.682	26.665.000	33.616.568	72.361.689
1.5 Belanja Bantuan Sosial	11.493.500	0	162.500	325.000	2.672.913
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	39.582.723	19.187.618	19.187.618	21.544.000	29.044.000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.096.696	45.037.500	35.072.194	66.846.980	79.369.134
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.224.137	2.050.000	1.000.000	1.890.000	3.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	313.501.986	545.675.553	692.855.308	801.579.706	744.102.728
2.1 Belanja Pegawai	27.788.854	49.495.005	54.688.927	18.637.751	17.674.915
2.2 Belanja Barang dan Jasa	226.288.037	278.492.925	388.529.059	511.682.959	516.563.756
2.3 Belanja Modal	59.425.095	217.687.623	249.637.322	271.258.996	209.864.057
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>89.900.000</b>	<b>68.959.918</b>	<b>75.227.510</b>	<b>85.000.000</b>	<b>11.861.634</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	90.000.000	71.930.674	89.979.713	100.000.000	100.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90.000.000	71.930.674	89.979.713	100.000.000	100.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000	2.970.756	14.752.203	15.000.000	64.819.583
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000	2.970.756	14.752.203	15.000.000	64.819.583
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>568.261.335</b>	<b>651.398.304</b>	<b>745.334.983</b>	<b>823.352.410</b>	<b>903.622.270</b>
1 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>41.330.606</b>	<b>46.470.110</b>	<b>68.485.482</b>	<b>89.349.645</b>	<b>98.032.646</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	9.000.787	11.043.396	22.069.530	30.111.096	32.861.322
1.2 Hasil Retribusi Daerah	4.521.870	6.750.578	7.905.026	8.836.895	8.925.326
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.602.469	2.853.011	3.937.071	4.940.559	4.912.892
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.205.480	25.823.127	34.573.855	45.461.095	51.333.106
2 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>396.658.413</b>	<b>464.324.549</b>	<b>517.834.703</b>	<b>546.799.187</b>	<b>577.461.799</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.668.027	27.391.860	21.511.707	18.427.053	15.688.309
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	339.501.986	396.762.339	450.919.726	484.825.804	486.895.030
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	35.488.400	40.170.350	45.403.270	43.546.330	74.878.460
3 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>130.272.316</b>	<b>140.603.644</b>	<b>159.014.797</b>	<b>187.203.579</b>	<b>228.127.824</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.498.752	79.964.813	86.699.593	114.153.616	131.798.589
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.986.724	51.680.144	70.517.727	70.899.963	83.094.188
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.786.840	8.958.688	1.797.477	2.150.000	825.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	12.410.047
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>546.848.475</b>	<b>664.723.060</b>	<b>718.538.444</b>	<b>786.285.299</b>	<b>885.633.184</b>
1 <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>358.144.524</b>	<b>394.837.894</b>	<b>416.035.004</b>	<b>441.901.508</b>	<b>506.733.928</b>
1.1 Belanja Pegawai	305.653.578	335.950.650	353.148.286	376.791.591	397.650.714
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	14.192.868	23.593.700	14.529.650	16.157.500	39.120.670
1.5 Belanja Bantuan Sosial	15.236.446	60.000	3.109.038	2.984.519	225.333
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.039.984	7.888.319	8.528.288	8.558.125	13.099.594
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.790.813	27.259.198	36.700.121	37.409.773	56.636.018
1.8 Belanja Tidak Terduga	230.835	86.028	19.622	0	1.599
2 <b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>188.703.951</b>	<b>269.885.166</b>	<b>302.503.439</b>	<b>344.383.791</b>	<b>378.899.256</b>
2.1 Belanja Pegawai	7.688.909	28.006.612	33.198.532	26.392.136	31.514.727
2.2 Belanja Barang dan Jasa	113.521.519	107.264.780	126.741.441	156.133.946	161.433.363
2.3 Belanja Modal	67.493.523	134.613.774	142.563.466	161.857.709	185.951.166
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>55.871.080</b>	<b>74.388.745</b>	<b>58.067.447</b>	<b>82.265.655</b>	<b>115.887.900</b>
1 <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>60.871.080</b>	<b>82.588.745</b>	<b>66.467.447</b>	<b>90.665.655</b>	<b>124.437.900</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.871.080	77.283.939	61.063.989	84.863.986	119.332.767
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	601.669	105.133
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5.000.000	5.304.805	5.403.458	5.200.000	5.000.000
2 <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.550.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.550.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.000.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>77.283.940</b>	<b>61.063.989</b>	<b>84.863.986</b>	<b>119.332.767</b>	<b>133.876.986</b>



Table 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>886.307.834</b>	<b>1.056.319.329</b>	<b>1.253.026.819</b>	<b>1.367.078.412</b>	<b>1.615.933.308</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>141.046.017</b>	<b>183.295.007</b>	<b>255.418.219</b>	<b>273.426.482</b>	<b>300.799.020</b>
1.1	Hasil Pajak Daerah	31.009.884	50.214.003	98.701.047	95.414.689	105.792.993
1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.524.712	28.540.910	40.393.769	42.557.737	47.030.646
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.404.979	5.925.320	8.046.089	7.197.219	7.322.114
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.106.442	98.614.773	108.277.313	128.256.837	140.653.267
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>534.404.760</b>	<b>656.500.460</b>	<b>734.577.587</b>	<b>799.770.748</b>	<b>815.846.445</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.814.528	34.787.676	22.499.522	21.634.728	17.441.963
2.2	Dana Alokasi Umum ( DAU )	463.073.532	574.346.244	663.156.595	719.621.530	722.004.642
2.3	Dana Alokasi Khusus ( DAK )	41.516.700	47.366.540	48.921.470	58.514.490	76.399.840
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>210.857.057</b>	<b>216.523.861</b>	<b>263.031.013</b>	<b>293.881.182</b>	<b>499.287.843</b>
3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	93.214.569
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	76.643.252	92.041.973	108.713.962	129.514.006	157.674.595
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.082.202	118.390.170	146.900.369	159.747.176	247.995.679
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.131.603	6.091.718	7.416.682	4.620.000	403.000
3.6	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>882.459.134</b>	<b>1.065.536.683</b>	<b>1.198.702.307</b>	<b>1.333.200.899</b>	<b>1.586.227.841</b>
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>639.160.268</b>	<b>728.164.337</b>	<b>809.282.889</b>	<b>904.158.292</b>	<b>1.050.345.518</b>
1.1	Belanja Pegawai	561.091.418	633.357.315	691.380.832	765.788.650	824.144.117
1.2	Belanja Bunga	81.413	72.318	62.830	53.534	44.197
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4	Belanja Hibah	16.911.048	29.847.290	34.772.500	42.877.500	45.344.113
1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.641.808	0	6.000.000	7.938.000	3.204.500
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.350.641	3.327.289	6.099.798	6.689.000	12.978.454
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	48.810.037	59.370.869	67.735.168	80.174.694	164.630.137
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.273.903	2.189.256	3.231.761	636.914	0
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>243.298.866</b>	<b>337.372.346</b>	<b>389.419.418</b>	<b>429.042.607</b>	<b>535.882.323</b>
2.1	Belanja Pegawai	12.058.728	13.332.878	13.194.053	13.824.716	33.905.165
2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.797.526	185.316.398	248.038.980	278.872.986	389.007.715
2.3	Belanja Modal	70.442.612	138.723.070	128.186.385	136.344.905	112.969.443
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>50.056.067</b>	<b>52.586.851</b>	<b>38.204.187</b>	<b>87.466.515</b>	<b>117.690.293</b>
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>50.534.102</b>	<b>53.964.886</b>	<b>43.482.222</b>	<b>92.899.550</b>	<b>121.968.328</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.534.102	53.904.766	43.369.497	92.528.624	121.329.374
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	370.926	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	60.120	112.725	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	638.954
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8	Lainnya	0	0	0	0	0
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>478.035</b>	<b>1.378.035</b>	<b>5.278.035</b>	<b>5.433.035</b>	<b>4.278.035</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	1.300.000	0	0	200.000
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	400.000	0	5.200.000	5.355.000	4.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	78.035	78.035	78.035	78.035	78.035
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5	Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>53.904.767</b>	<b>43.369.497</b>	<b>92.528.698</b>	<b>121.344.102</b>	<b>147.395.760</b>



**Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)**

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.850.767.401</b>	<b>2.618.695.201</b>	<b>2.954.662.971</b>	<b>3.459.986.016</b>	<b>3.735.129.565</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.406.298.099</b>	<b>1.870.187.279</b>	<b>2.279.113.502</b>	<b>2.722.625.563</b>	<b>3.001.464.263</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	1.281.507.140	1.685.560.837	2.010.554.251	2.339.332.865	2.598.718.130
1.2 Hasil Retribusi Daerah	35.830.043	68.946.271	90.457.626	116.502.661	96.040.159
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.588.094	41.756.733	71.350.740	125.339.003	142.995.660
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.372.822	73.923.438	106.750.885	141.451.034	163.710.314
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>280.705.583</b>	<b>515.654.159</b>	<b>429.797.446</b>	<b>381.713.596</b>	<b>332.251.562</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	123.435.032	160.747.933	56.611.263	56.346.741	44.947.526
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	157.052.376	353.067.906	372.625.383	324.815.695	286.763.106
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	218.175	1.838.320	560.800	551.160	540.930
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>163.763.719</b>	<b>232.853.762</b>	<b>245.752.022</b>	<b>355.646.857</b>	<b>401.413.740</b>
3.1 Pendapatan Hibah	89.625	0	0	70.344.473	75.091.364
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.903.646	122.552.871	102.342.371	130.253.478	162.799.634
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	84.655.997	76.432.769	113.491.184	131.532.528	163.317.741
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.015.040	10.583.570	960.285	205.000	205.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.099.411	23.284.553	28.958.182	23.311.379	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.572.210.488</b>	<b>2.334.080.297</b>	<b>2.755.459.722</b>	<b>3.276.164.110</b>	<b>3.446.634.315</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.059.192.475</b>	<b>1.268.529.843</b>	<b>1.488.224.177</b>	<b>1.654.384.787</b>	<b>1.909.366.328</b>
1.1 Belanja Pegawai	657.803.294	767.437.703	881.464.639	982.021.269	1.035.507.051
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	540.000	910.000	2.090.000	3.837.400	5.393.600
1.4 Belanja Hibah	43.186.759	444.320.461	95.313.469	93.604.910	144.802.581
1.5 Belanja Bantuan Sosial	32.012.617	48.119.962	52.141.750	33.549.093	26.839.800
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	126.170.160	191.156.530	212.227.730	272.387.605	332.221.197
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	198.646.101	216.289.003	234.132.969	268.781.366	364.602.099
1.8 Belanja Tidak Terduga	833.544	296.183	10.853.620	203.145	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>513.018.013</b>	<b>1.065.550.455</b>	<b>1.267.235.545</b>	<b>1.621.779.323</b>	<b>1.537.267.986</b>
2.1 Belanja Pegawai	51.806.056	63.448.807	75.694.058	63.427.200	59.742.497
2.2 Belanja Barang dan Jasa	261.507.743	374.395.948	424.829.297	609.282.785	554.753.161
2.3 Belanja Modal	199.704.214	627.705.700	766.712.190	949.069.337	922.772.328
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>478.845.039</b>	<b>614.687.764</b>	<b>688.998.737</b>	<b>739.884.087</b>	<b>625.326.073</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>497.292.439</b>	<b>759.887.764</b>	<b>902.998.737</b>	<b>893.884.087</b>	<b>925.326.073</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	497.292.439	757.401.952	901.461.570	888.147.920	923.705.992
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	455.618
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	2.485.813	1.537.167	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	5.736.167	1.164.463
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>18.447.400</b>	<b>145.200.000</b>	<b>214.000.000</b>	<b>154.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000	145.200.000	214.000.000	154.000.000	300.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	1.947.400	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>757.401.952</b>	<b>899.302.668</b>	<b>888.201.966</b>	<b>923.705.992</b>	<b>913.821.324</b>



Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>834.194.082</b>	<b>1.066.239.511</b>	<b>1.248.415.648</b>	<b>1.400.913.781</b>	<b>1.527.797.536</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>175.273.316</b>	<b>261.222.178</b>	<b>319.612.005</b>	<b>424.472.546</b>	<b>457.321.018</b>
1.1	Hasil Pajak Daerah	108.569.444	159.636.602	204.436.633	276.603.966	307.668.563
1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.527.101	30.400.835	31.816.584	35.472.015	40.055.120
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.339.119	5.340.708	7.247.310	9.685.085	7.530.611
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.837.652	65.844.032	76.111.478	102.711.480	102.066.724
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>499.403.645</b>	<b>604.397.691</b>	<b>690.817.394</b>	<b>694.464.178</b>	<b>673.568.860</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.427.453	35.584.490	36.365.388	22.906.730	18.983.901
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	434.899.892	532.883.001	609.293.266	626.674.608	641.915.439
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	41.076.300	35.930.200	45.158.740	44.882.840	12.669.520
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>159.517.121</b>	<b>200.619.642</b>	<b>237.986.249</b>	<b>281.977.057</b>	<b>396.907.658</b>
3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	1.254.000	71.207.425
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.588.482	78.603.207	74.464.120	102.717.775	121.995.559
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	115.338.699	110.035.955	161.704.394	177.774.328	198.962.709
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.589.940	11.980.481	1.817.735	205.000	4.741.965
3.6	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	25.954	0
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>903.930.942</b>	<b>1.006.500.072</b>	<b>1.192.027.629</b>	<b>1.354.851.666</b>	<b>1.504.436.669</b>
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>616.074.683</b>	<b>697.912.390</b>	<b>770.124.483</b>	<b>862.790.093</b>	<b>936.408.399</b>
1.1	Belanja Pegawai	524.828.636	593.821.653	642.045.061	729.415.554	766.423.103
1.2	Belanja Bunga	1.074.200	20.833	89	0	0
1.3	Belanja Subsidi	2.818.320	2.831.540	2.848.695	0	0
1.4	Belanja Hibah	19.163.188	42.778.954	41.656.367	29.888.691	24.717.940
1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.037.900	597.000	15.107.844	10.137.470	5.172.084
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21.587.446	24.171.698	27.839.464	31.767.119	31.719.899
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.677.686	33.545.180	40.625.763	60.969.556	107.944.073
1.8	Belanja Tidak Terduga	887.307	0	1.200	611.702	431.300
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>287.856.259</b>	<b>308.587.682</b>	<b>421.903.146</b>	<b>492.061.573</b>	<b>568.028.270</b>
2.1	Belanja Pegawai	30.445.038	29.802.387	31.294.706	34.272.471	48.670.764
2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.263.070	158.157.838	205.284.944	256.608.015	295.175.011
2.3	Belanja Modal	124.148.151	120.627.457	185.323.496	201.181.086	224.182.495
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>69.736.860</b>	<b>89.010.275</b>	<b>143.249.714</b>	<b>191.137.733</b>	<b>227.478.093</b>
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>85.234.502</b>	<b>92.350.132</b>	<b>148.749.714</b>	<b>199.637.733</b>	<b>239.737.667</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	74.604.802	92.350.132	148.749.714	199.637.733	239.737.667
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	10.629.700	0	0	0	0
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8	Lainnya	0	0	0	0	0
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15.497.642</b>	<b>3.339.857</b>	<b>5.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>12.259.574</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000	3.000.000	5.500.000	8.500.000	12.259.574
2.3	Pembayaran Pokok Utang	11.981.972	339.857	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5	Lainnya	515.670	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>148.749.714</b>	<b>199.637.732</b>	<b>273.199.846</b>	<b>250.838.960</b>



Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>502.868.134</b>	<b>590.231.294</b>	<b>711.405.235</b>	<b>827.028.807</b>	<b>907.139.632</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>40.735.839</b>	<b>48.561.525</b>	<b>67.401.910</b>	<b>98.837.766</b>	<b>120.035.996</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	5.017.639	3.480.972	13.234.733	19.654.037	34.668.113
1.2 Hasil Retribusi Daerah	26.782.629	0	10.597.832	22.441.798	21.776.641
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.157.184	5.962.299	8.595.168	8.093.536	7.164.793
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.778.387	39.118.525	34.974.178	48.648.395	56.426.449
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>358.900.413</b>	<b>432.131.856</b>	<b>496.925.310</b>	<b>532.950.783</b>	<b>542.012.560</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.878.856	19.970.390	19.967.531	16.255.597	14.233.393
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	319.611.407	387.340.103	444.174.019	474.427.796	484.541.151
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	22.410.150	24.821.363	32.783.760	42.267.390	43.238.016
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>103.231.882</b>	<b>109.537.913</b>	<b>147.078.015</b>	<b>195.240.258</b>	<b>245.091.076</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	1.890.000	23.770.800
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.250.528	59.623.497	75.819.536	96.050.343	115.063.231
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.715.909	43.179.357	70.411.164	89.963.515	105.854.045
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.265.445	6.735.059	847.315	7.336.400	403.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>494.652.376</b>	<b>598.898.361</b>	<b>665.548.503</b>	<b>783.124.988</b>	<b>890.952.557</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>360.838.243</b>	<b>406.736.633</b>	<b>470.137.179</b>	<b>515.195.550</b>	<b>572.974.721</b>
1.1 Belanja Pegawai	323.840.072	364.767.535	392.033.389	432.626.792	456.198.002
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	8.820.405	20.336.674	51.765.579	51.821.910	34.722.283
1.5 Belanja Bantuan Sosial	11.845.824	4.128.700	604.457	2.407.500	1.511.500
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	538.256	793.983	207.220	1.219.296	8.354.294
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.511.047	16.395.757	25.507.616	27.007.417	72.188.642
1.8 Belanja Tidak Terduga	282.639	313.983	18.918	112.636	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>133.814.133</b>	<b>192.161.730</b>	<b>195.411.324</b>	<b>267.929.438</b>	<b>317.977.836</b>
2.1 Belanja Pegawai	10.991.566	10.620.685	17.076.559	11.255.085	16.865.673
2.2 Belanja Barang dan Jasa	73.812.317	100.317.861	114.240.793	156.857.982	181.773.764
2.3 Belanja Modal	49.010.250	81.223.182	64.093.972	99.816.371	119.338.399
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>58.442.594</b>	<b>64.623.353</b>	<b>52.846.285</b>	<b>96.103.817</b>	<b>138.677.227</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>59.942.594</b>	<b>66.723.353</b>	<b>56.846.285</b>	<b>98.853.817</b>	<b>142.277.227</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.472.594	66.658.353	55.956.285	98.703.817	141.802.227
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	470.000	65.000.000	0	150.000	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	890.000	0	475.000
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.600.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	3.600.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000	2.100.000	4.000.000	2.750.000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>66.658.352</b>	<b>55.958.285</b>	<b>98.703.017</b>	<b>140.006.836</b>	<b>154.864.302</b>



Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>543.348.390</b>	<b>622.718.265</b>	<b>702.229.030</b>	<b>793.647.679</b>	<b>873.469.027</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>22.961.238</b>	<b>40.751.050</b>	<b>55.986.570</b>	<b>76.141.461</b>	<b>87.731.141</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	3.811.440	6.107.125	7.679.636	11.802.145	12.557.945
1.2 Hasil Retribusi Daerah	12.652.617	10.101.009	11.302.691	14.995.769	18.566.238
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.425.425	2.563.279	3.425.035	3.550.338	4.008.691
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.071.756	21.979.637	33.579.207	45.793.210	52.598.267
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>372.313.517</b>	<b>459.413.969</b>	<b>513.012.768</b>	<b>546.402.982</b>	<b>569.345.606</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.587.106	24.211.806	23.512.514	16.826.057	14.512.035
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	321.381.411	396.942.913	450.812.694	486.381.005	499.734.801
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	29.345.000	38.259.250	38.687.560	43.195.920	55.098.770
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>148.073.635</b>	<b>122.553.247</b>	<b>133.229.692</b>	<b>171.103.236</b>	<b>216.392.280</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.507.846	72.005.747	76.161.491	97.884.223	117.658.813
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	91.782.184	39.289.956	55.975.166	71.999.013	96.577.827
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.783.605	11.257.543	1.043.035	1.220.000	2.155.640
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	50.000	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>531.823.076</b>	<b>592.232.375</b>	<b>652.343.659</b>	<b>762.376.999</b>	<b>899.776.029</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>366.223.973</b>	<b>395.736.957</b>	<b>475.739.271</b>	<b>556.735.255</b>	<b>616.282.161</b>
1.1 Belanja Pegawai	305.727.749	345.288.250	371.523.272	417.521.985	475.644.606
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	165.000	1.415.000	165.000	0	0
1.4 Belanja Hibah	7.022.751	6.479.550	32.678.300	61.031.213	45.155.081
1.5 Belanja Bantuan Sosial	15.517.355	0	2.264.325	3.255.000	1.080.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.573.292	1.787.335	1.972.462	2.420.830	3.335.672
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	35.104.501	40.555.934	67.135.912	71.375.085	91.066.802
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.113.325	210.887	0	1.131.142	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>165.599.103</b>	<b>196.495.419</b>	<b>176.604.387</b>	<b>205.641.743</b>	<b>283.493.868</b>
2.1 Belanja Pegawai	18.789.138	19.555.794	20.116.995	19.937.561	46.406.486
2.2 Belanja Barang dan Jasa	45.382.098	94.598.698	93.724.429	115.486.913	126.373.661
2.3 Belanja Modal	101.427.867	82.340.927	62.762.964	70.217.269	110.713.721
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>56.335.538</b>	<b>23.647.021</b>	<b>-3.694.086</b>	<b>96.836.097</b>	<b>127.941.507</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>58.911.538</b>	<b>24.780.384</b>	<b>675.000</b>	<b>101.336.097</b>	<b>127.941.507</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.380.361	24.780.384	0	100.203.467	127.941.507
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	484.260	0	675.000	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	46.917	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	1.132.630	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.576.000</b>	<b>1.133.363</b>	<b>4.369.086</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	4.500.000	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.576.000	500.000	4.000.000	0	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	633.363	369.086	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>67.860.852</b>	<b>54.132.911</b>	<b>46.191.286</b>	<b>128.106.777</b>	<b>101.634.505</b>





Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>820.520.892</b>	<b>907.014.578</b>	<b>1.041.577.611</b>	<b>1.248.392.023</b>	<b>1.367.577.564</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>129.556.195</b>	<b>144.019.629</b>	<b>168.652.790</b>	<b>239.425.005</b>	<b>243.125.914</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	82.210.999	92.776.781	103.841.036	138.541.746	139.626.191
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7.925.193	10.977.702	11.991.692	13.022.203	14.255.154
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.747.794	11.470.823	15.235.409	17.064.083	13.535.055
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.672.209	28.794.323	37.584.653	70.796.973	75.709.514
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>478.284.989</b>	<b>578.456.232</b>	<b>644.192.869</b>	<b>695.408.544</b>	<b>706.426.130</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.742.874	28.662.642	29.001.444	20.141.103	17.307.499
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	409.812.715	503.028.930	563.981.785	614.793.461	633.241.287
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	41.729.400	46.764.660	51.209.640	60.473.980	55.877.344
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>212.679.708</b>	<b>184.538.717</b>	<b>228.731.952</b>	<b>313.558.474</b>	<b>418.025.520</b>
3.1 Pendapatan Hibah	397.723	429.804	425.450	3.509.238	79.127.259
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.259.778	65.109.846	66.786.104	95.553.641	105.387.045
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.564.038	80.380.941	116.152.134	142.071.021	178.178.534
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.439.789	38.546.911	45.360.033	72.414.169	55.317.714
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.380	71.215	8.231	10.405	14.968
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>801.321.516</b>	<b>942.886.355</b>	<b>1.078.485.761</b>	<b>1.164.866.358</b>	<b>1.351.846.275</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>538.842.892</b>	<b>599.322.204</b>	<b>688.108.423</b>	<b>761.203.217</b>	<b>889.847.572</b>
1.1 Belanja Pegawai	463.166.153	514.003.615	576.905.293	643.596.813	703.046.385
1.2 Belanja Bunga	144.207	2.225.028	3.421.036	6.262.865	4.458.177
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	9.527.144	34.230.533	41.429.597	32.191.765	41.061.315
1.5 Belanja Bantuan Sosial	25.860.500	252.000	2.489.140	2.418.500	675.828
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.292.812	13.745.818	16.715.617	19.805.558	16.286.253
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.238.540	32.707.087	44.047.141	56.927.716	123.735.350
1.8 Belanja Tidak Terduga	613.536	2.158.123	3.100.599	0	584.264
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>262.478.624</b>	<b>343.564.151</b>	<b>390.377.338</b>	<b>403.463.141</b>	<b>461.998.703</b>
2.1 Belanja Pegawai	14.051.897	14.801.229	18.845.308	16.731.571	27.540.823
2.2 Belanja Barang dan Jasa	129.589.778	157.131.972	190.794.382	209.173.812	256.033.241
2.3 Belanja Modal	118.836.949	171.630.950	180.737.648	177.557.758	178.424.639
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>65.809.179</b>	<b>116.459.534</b>	<b>138.305.125</b>	<b>171.668.610</b>	<b>127.129.691.042</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>72.129.344</b>	<b>120.763.210</b>	<b>147.340.373</b>	<b>101.416.983</b>	<b>155.856.073.975</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71.968.220	85.008.554	80.587.755	101.396.976	155.844.273.975
1.2 Pencairan Dana Cadangan	142.667	5.683.029	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	30.052.577	65.744.496	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	1.000.000	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	8.122	20.007	11.800.000
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	18.457	19.050	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>6.320.165</b>	<b>4.303.676</b>	<b>9.035.248</b>	<b>29.748.373</b>	<b>28.726.382.933</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	4.255.733	325.695	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000	3.847.108	3.000.000	6.000.000	4.978.010.016
2.3 Pembayaran Pokok Utang	564.432	130.873	6.035.248	23.748.373	23.748.372.917
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>85.008.555</b>	<b>80.587.757</b>	<b>101.396.975</b>	<b>155.844.274</b>	<b>127.145.422.331</b>



Table 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.054.706.126</b>	<b>1.196.436.251</b>	<b>1.390.657.293</b>	<b>1.543.584.631</b>	<b>1.937.771.345</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>109.167.026</b>	<b>129.003.995</b>	<b>160.292.011</b>	<b>219.682.330</b>	<b>293.038.467</b>
1.1	Hasil Pajak Daerah	32.385.332	39.124.665	57.770.211	85.017.340	110.723.083
1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.185.897	13.132.938	14.872.963	12.684.819	19.944.242
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.954.471	9.369.948	12.732.894	11.740.066	12.657.529
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.641.326	67.376.444	74.915.942	110.240.105	149.713.612
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>660.585.990</b>	<b>793.541.645</b>	<b>907.851.103</b>	<b>947.573.267</b>	<b>983.333.688</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.735.330	43.254.749	44.119.859	28.142.809	26.264.579
2.2	Dana Alokasi Umum ( DAU )	568.131.660	687.697.696	796.419.224	854.532.248	868.511.959
2.3	Dana Alokasi Khusus ( DAK )	54.719.000	62.589.200	67.312.020	64.898.210	88.557.150
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>284.953.110</b>	<b>273.890.611</b>	<b>322.514.179</b>	<b>376.329.034</b>	<b>661.399.189</b>
3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	1.958.000
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.404.153	129.243.140	131.792.220	152.730.072	194.472.620
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	171.262.766	126.021.617	186.572.702	218.781.224	463.880.846
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.392.180	17.662.272	3.208.921	4.350.000	777.662
3.6	Lain-lain Pendapatan yang Sah	894.011	963.582	940.336	467.738	310.062
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.038.052.441</b>	<b>1.123.510.074</b>	<b>1.413.380.933</b>	<b>1.558.960.849</b>	<b>1.865.996.555</b>
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>715.826.155</b>	<b>830.820.428</b>	<b>944.333.238</b>	<b>1.024.745.249</b>	<b>1.121.044.573</b>
1.1	Belanja Pegawai	633.464.123	725.807.231	828.895.332	892.968.692	911.423.652
1.2	Belanja Bunga	120.748	86.681	52.092	21.751	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4	Belanja Hibah	20.152.435	47.719.209	36.751.500	28.672.500	34.159.908
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.298.700	1.512.000	4.618.811	4.115.000	4.500.000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.999.963	3.999.969	3.930.092	8.207.840	9.880.038
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	49.801.844	51.154.442	69.352.870	83.733.566	160.890.165
1.8	Belanja Tidak Terduga	2.988.342	540.895	732.540	7.025.900	190.811
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>322.226.286</b>	<b>292.689.646</b>	<b>469.047.695</b>	<b>534.215.600</b>	<b>744.951.983</b>
2.1	Belanja Pegawai	20.241.527	19.591.457	30.365.373	29.705.058	54.131.113
2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.088.848	193.664.351	252.785.605	320.882.679	464.500.743
2.3	Belanja Modal	121.895.911	79.433.838	185.896.717	183.627.864	226.320.127
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>59.166.101</b>	<b>73.018.042</b>	<b>134.355.572</b>	<b>108.688.273</b>	<b>91.254.055</b>
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>60.467.845</b>	<b>75.819.786</b>	<b>145.944.219</b>	<b>111.631.932</b>	<b>93.312.055</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.467.845	75.819.786	145.944.219	111.631.932	93.312.055
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8	Lainnya	0	0	0	0	0
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.301.744</b>	<b>2.801.744</b>	<b>11.588.647</b>	<b>2.943.659</b>	<b>2.058.000</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000	2.500.000	11.315.946	2.700.000	2.058.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	301.744	301.744	272.701	243.659	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5	Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>75.819.786</b>	<b>145.944.219</b>	<b>111.631.932</b>	<b>93.312.055</b>	<b>163.028.844</b>



Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.150.071.695</b>	<b>1.379.049.166</b>	<b>1.547.605.213</b>	<b>1.727.968.713</b>	<b>1.786.400.782</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>424.959.413</b>	<b>511.326.621</b>	<b>658.974.707</b>	<b>698.739.758</b>	<b>776.214.149</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	326.282.112	377.247.592	504.981.564	510.582.656	549.362.947
1.2 Hasil Retribusi Daerah	24.424.894	43.772.750	47.874.288	54.764.870	59.243.427
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.417.779	18.489.907	20.774.563	24.953.438	35.341.143
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.834.628	71.816.372	85.344.292	108.438.795	132.266.631
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>491.014.027</b>	<b>655.349.185</b>	<b>661.103.049</b>	<b>693.247.533</b>	<b>681.684.333</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	106.085.023	134.193.389	72.201.429	69.892.793	50.479.636
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	381.372.204	512.666.446	580.807.702	615.961.906	625.978.507
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	3.556.800	8.489.350	8.093.918	7.392.834	5.226.190
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>234.098.255</b>	<b>212.373.359</b>	<b>227.527.456</b>	<b>335.981.421</b>	<b>328.502.300</b>
3.1 Pendapatan Hibah	4.782.530	3.273.529	1.487.687	4.110.072	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.779.089	105.202.989	98.076.351	126.747.131	170.161.549
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.271.936	89.705.986	127.408.208	204.874.218	158.090.751
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.264.700	14.190.855	555.210	250.000	250.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.100.129.048</b>	<b>1.309.529.832</b>	<b>1.537.883.625</b>	<b>1.648.378.769</b>	<b>1.757.644.194</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>680.575.385</b>	<b>700.414.759</b>	<b>800.979.096</b>	<b>903.436.801</b>	<b>1.034.937.556</b>
1.1 Belanja Pegawai	562.668.706	607.158.432	672.344.600	755.951.062	769.525.774
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	40.769.624	27.591.357	58.971.605	46.883.417	87.123.626
1.5 Belanja Bantuan Sosial	15.383.363	0	218.635	162.500	2.723.500
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18.987.618	19.187.618	21.544.000	29.044.000	29.044.000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	41.893.802	46.181.343	38.776.154	71.371.172	146.440.463
1.8 Belanja Tidak Terduga	872.272	296.008	9.124.102	24.650	80.193
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>419.553.663</b>	<b>609.115.073</b>	<b>736.904.529</b>	<b>744.941.968</b>	<b>722.706.638</b>
2.1 Belanja Pegawai	35.505.711	50.005.352	50.422.357	14.758.938	17.551.898
2.2 Belanja Barang dan Jasa	295.276.291	352.966.007	432.473.820	496.141.308	512.835.219
2.3 Belanja Modal	88.771.661	206.143.714	254.008.353	234.041.722	192.319.521
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>155.893.597</b>	<b>188.277.555</b>	<b>212.643.283</b>	<b>202.344.527</b>	<b>214.951.519</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>158.393.597</b>	<b>205.911.244</b>	<b>257.805.713</b>	<b>222.364.871</b>	<b>281.934.472</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	156.149.426	205.836.244	257.796.739	222.364.871	281.913.662
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	75.000	8.974	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	20.810
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	2.244.171	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.500.000</b>	<b>17.633.689</b>	<b>45.162.430</b>	<b>20.020.344</b>	<b>66.982.953</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000	17.633.689	45.054.173	19.999.306	66.982.953
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	108.256	21.037	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>205.836.244</b>	<b>257.796.889</b>	<b>222.364.872</b>	<b>281.934.472</b>	<b>243.708.107</b>



Tabel 19. Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

	Rincian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.951.553.208</b>	<b>8.703.171.321</b>	<b>10.201.244.206</b>	<b>11.461.036.529</b>	<b>13.118.282.779</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.647.848.273	2.374.267.917	3.223.494.053	3.860.089.700	4.549.203.863
1.1	Hasil Pajak Daerah	1.198.237.774	1.777.314.867	2.503.361.648	2.942.159.031	3.422.480.277
1.2	Hasil Retribusi Daerah	133.346.753	146.443.868	213.582.870	255.437.829	267.093.902
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72.415.025	89.407.759	103.478.429	162.188.518	198.244.290
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	243.848.721	361.101.423	403.071.108	500.304.331	661.385.394
2	DANA PERIMBANGAN	4.170.357.102	5.023.533.863	5.555.190.693	5.844.837.631	576.836.925
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	496.517.477	364.295.265	267.227.243	259.830.478	296.484.890
2.2	Dana Alokasi Umum ( DAU )	3.396.200.925	4.344.735.578	4.932.190.390	5.202.034.053	5.249.585.922
2.3	Dana Alokasi Khusus ( DAK )	277.638.700	314.503.020	354.773.060	382.973.100	381.516.540
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.133.347.833	1.305.369.541	1.423.529.459	1.756.109.189	2.641.491.564
3.1	Pendapatan Hibah	113.065.787	5.108.512	2.108.512	2.056.248	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	470.507.824	656.644.316	733.498.902	777.025.922	1.091.618.295
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	497.266.922	549.428.150	587.744.986	823.283.792	1.465.441.715
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	51.739.130	70.142.011	71.248.877	130.431.848	79.320.484
3.6	Lain-lain Pendapatan yang Sah	768.170	24.046.552	28.958.182	23.311.379	5.111.070
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.662.981.895</b>	<b>9.255.009.021</b>	<b>11.020.034.194</b>	<b>12.448.638.938</b>	<b>13.936.249.170</b>
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.332.012.248	5.936.235.348	6.652.345.883	7.325.033.676	8.824.140.413
1.1	Belanja Pegawai	4.397.461.005	4.931.191.044	5.395.586.792	5.897.710.220	6.824.110.017
1.2	Belanja Bunga	1.459.200	1.540.050	8.325.000	8.325.000	8.265.000
1.3	Belanja Subsidi	3.823.320	3.643.320	6.127.920	3.870.000	5.420.000
1.4	Belanja Hibah	210.283.373	231.319.853	274.918.632	318.140.301	517.643.029
1.5	Belanja Bantuan Sosial	110.593.727	50.625.905	86.506.692	67.984.107	62.666.043
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	184.250.213	205.766.515	276.242.047	337.940.887	401.513.984
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	410.381.437	497.937.805	592.823.537	671.811.187	987.161.313
1.8	Belanja Tidak Terduga	13.759.973	14.210.856	13.815.354	19.251.974	17.361.027
2	BELANJA LANGSUNG	2.330.969.647	3.318.773.673	4.367.688.311	5.123.605.262	5.112.108.757
2.1	Belanja Pegawai	174.156.308	243.018.028	298.217.409	248.135.093	299.007.129
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.219.485.451	1.508.410.731	1.979.102.679	2.556.767.548	2.620.405.931
2.3	Belanja Modal	937.327.888	1.567.344.914	2.090.368.225	2.318.702.621	2.192.695.697
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>712.161.346</b>	<b>552.537.284</b>	<b>818.789.988</b>	<b>988.296.112</b>	<b>215.632.438</b>
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	748.846.575	722.846.001	998.019.191	1.063.972.551	957.931.118
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	736.372.111	612.973.751	924.799.768	1.057.959.657	952.293.224
1.2	Pencairan Dana Cadangan	5.537.204	5.357.333	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	98.349.792	65.817.423	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	168.125	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	62.894	0
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	62.894
1.8	Lainnya	6.937.260	5.997.000	7.402.000	5.950.000	5.575.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.685.229	170.308.717	179.229.203	75.676.439	139.964.727
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	14.092.375	312.979	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.050.000	162.667.864	158.152.203	45.083.439	108.871.727
2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.367.454	1.230.874	14.880.000	25.393.000	25.893.000
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	997.000	0	0
2.5	Lainnya	8.175.400	6.097.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
<b>D</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>732.659</b>	<b>699.584</b>	<b>0</b>	<b>693.703</b>	<b>0</b>



Tabel 20. Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2011 - 2015 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8.211.045.889</b>	<b>10.088.101.899</b>	<b>11.594.914.803</b>	<b>13.191.952.471</b>	<b>14.654.841.029</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>41.330.606</b>	<b>46.470.110</b>	<b>68.485.482</b>	<b>4.842.700.555</b>	<b>5.377.762.614</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	9.000.787	11.043.396	22.069.530	3.507.060.540	3.891.979.288
1.2 Hasil Retribusi Daerah	4.521.870	6.750.578	7.905.026	321.278.766	325.836.952
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.602.469	2.853.011	3.937.071	212.563.327	235.468.489
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.205.480	25.823.127	34.573.855	801.797.923	924.477.885
<b>2 DANA PERMBANGAN</b>	<b>396.658.413</b>	<b>464.324.549</b>	<b>517.834.703</b>	<b>5.838.330.818</b>	<b>5.881.930.984</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.668.027	27.391.860	21.511.707	270.573.611	219.858.842
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	339.501.986	396.762.339	450.919.726	5.202.034.053	5.249.585.922
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	35.488.400	40.170.350	45.403.270	365.723.154	412.486.220
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>130.272.316</b>	<b>140.603.644</b>	<b>159.014.797</b>	<b>2.510.921.998</b>	<b>3.395.147.431</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	81.107.783	344.369.417
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.498.752	79.964.813	86.699.593	1.045.604.285	1.277.011.636
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.986.724	51.680.144	70.517.727	1.267.642.986	1.695.952.320
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.786.840	8.958.688	1.797.477	92.750.569	65.078.981
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	23.815.476	12.735.077
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>546.848.475</b>	<b>664.723.060</b>	<b>718.538.444</b>	<b>12.668.009.935</b>	<b>14.189.147.619</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>358.144.524</b>	<b>394.837.894</b>	<b>416.035.004</b>	<b>7.624.550.751</b>	<b>8.637.940.756</b>
1.1 Belanja Pegawai	305.653.578	335.950.650	353.148.286	5.996.682.408	6.339.563.403
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	6.338.150	4.502.374
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	3.837.400	5.393.600
1.4 Belanja Hibah	14.192.868	23.593.700	14.529.650	403.129.406	496.207.517
1.5 Belanja Bantuan Sosial	15.236.446	60.000	3.109.038	66.967.581	45.932.545
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.039.984	7.888.319	8.528.288	380.099.373	456.919.401
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.790.813	27.259.198	36.700.121	757.750.346	1.288.133.748
1.8 Belanja Tidak Terduga	230.835	86.028	19.622	9.746.088	1.288.168
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>188.703.951</b>	<b>269.885.166</b>	<b>302.503.439</b>	<b>5.043.459.184</b>	<b>5.551.206.863</b>
2.1 Belanja Pegawai	7.688.909	28.006.612	33.198.532	230.304.736	336.329.146
2.2 Belanja Barang dan Jasa	113.521.519	107.264.780	126.741.441	2.599.440.426	2.941.885.878
2.3 Belanja Modal	67.493.523	134.613.774	142.563.466	2.213.714.022	2.272.991.839
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>55.871.080</b>	<b>74.388.745</b>	<b>58.067.447</b>	<b>1.676.395.313</b>	<b>128.788.897.708</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>60.871.080</b>	<b>82.588.745</b>	<b>66.467.447</b>	<b>1.912.690.724</b>	<b>157.913.009.203</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.871.080	77.283.939	61.063.989	1.899.479.326	157.893.349.225
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	455.618
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	370.926	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	150.000	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	621.676	12.564.897
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	8.868.796	1.164.463
1.7 Lainnya	5.000.000	5.304.805	5.403.458	5.200.000	5.475.000
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>236.295.410</b>	<b>29.124.111.495</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	4.500.000	3.800.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	3.200.000	3.200.000	202.504.306	5.366.860.543
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	24.091.104	23.748.450.952
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.000.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>77.283.940</b>	<b>61.063.989</b>	<b>84.863.986</b>	<b>2.236.787.121</b>	<b>129.254.591.118</b>



**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

*Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar- 80226*

*Telp: (0361) 238159, Fax : 238162*

*Website : <http://bali.bps.go.id>*

*E-mail : [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)*

ISSN 2477-7773



9 772477 777006

